**Dinamika Ekonomi Indonesia: Dampak Inflasi, Deflasi, Judi Online, dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Keuangan**

Journal of Correctional Management

2025, Vol.2 (1) 52 - 61

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review

23-06-2025

Accepted

27-06-2025

**Dari Aulia Qital**

Politeknik Pengayoman Indonesia

***Abstract***

*Indonesia's economy in 2025 is influenced by a number of interrelated factors, namely inflation-deflation fluctuations, money circulation from online gambling, and large-scale corruption cases. Controlled inflation of 1.60% and deflation of 0.48% in February reflect the government's success in suppressing prices through fiscal and monetary policies. However, deflation also indicates weak aggregate demand, especially from household consumption, which can hamper economic growth. On the other hand, the turnover of funds from online gambling is estimated to reach IDR 1,200 trillion in 2025. This spike poses a serious risk to the stability of the financial system, because it is often related to money laundering practices, terrorism financing, and other illegal activities. In addition, corruption in large projects such as the PT Pertamina case which cost the state up to IDR 968.5 trillion has also exacerbated social inequality and reduced the potential for state revenue. This is a major obstacle to the realization of inclusive and equitable economic growth. This study aims to examine the impact of these three factors on the stability of the Indonesian economy. The policy recommendations proposed include: Formulating a more careful and responsive monetary policy, Strict law enforcement against online gambling and corruption practices, Increasing supervision of illegal fund flows to strengthen transparency and reduce social inequality.*

*Keywords : Inflation, Deflation, Online Gambling, Corruption, Economic Stability, Monetary Policy.*

**Abstrak**

Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, yakni fluktuasi inflasi-deflasi, perputaran uang dari judi online, dan kasus korupsi berskala besar. Inflasi yang terkendali sebesar 1,60% dan deflasi 0,48% pada Februari mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menekan harga melalui kebijakan fiskal dan moneter. Namun, deflasi juga menunjukkan lemahnya permintaan agregat, terutama dari konsumsi rumah tangga, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perputaran dana dari judi online diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun pada 2025. Lonjakan ini menimbulkan risiko serius terhadap stabilitas sistem keuangan, karena seringkali berkaitan dengan praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, korupsi dalam proyek besar seperti kasus PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun turut memperburuk ketimpangan sosial dan mengurangi potensi pendapatan negara. Hal ini menjadi penghambat utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak ketiga faktor tersebut terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Adapun rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi: Perumusan kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan responsif, Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik judi online dan korupsi,Peningkatan pengawasan terhadap aliran dana ilegal untuk memperkuat transparansi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Kata kunci : Inflasi, Deflasi, Judi Online, Korupsi, Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Moneter.

**Pendahuluan**

Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mengalami dinamika yang cukup signifikan, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi fluktuasi inflasi dan deflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas harga barang dan jasa. Inflasi yang terjaga rendah pada angka 1,60% pada 2025, seiring dengan terjadinya deflasi sebesar 0,48% pada bulan Februari tahun yang sama, mencerminkan dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Namun, fluktuasi harga pangan dan biaya energi tetap menjadi faktor yang dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi (Laras et al., 2024).

Di tengah ketidakpastian tersebut, perputaran uang dalam sektor yang tidak sah, seperti judi online, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Diperkirakan, pada tahun 2025, perputaran uang di sektor judi online akan mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp 1.200 triliun. Judi online telah semakin mudah diakses berkat perkembangan teknologi digital yang memungkinkan siapa saja untuk berjudi dengan menggunakan ponsel pintar dan komputer. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap stabilitas keuangan negara tetapi juga menciptakan gangguan pada sektor sosial dan psikologis, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Penelitian oleh Nayottama (2024) menyatakan bahwa judi online meningkatkan stres finansial di kalangan mahasiswa dan mengganggu konsentrasi akademik mereka, dengan dampak jangka panjang yang bisa merusak stabilitas sosial.

Selain itu, sektor korupsi, khususnya yang melibatkan transaksi megatransaksional dalam proyek-proyek besar, turut menjadi ancaman serius terhadap perekonomian Indonesia. Korupsi di sektor infrastruktur dan pembangunan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus Pertamina, di mana negara merugi hingga Rp 968,5 triliun. Praktik-praktik korupsi ini tidak hanya mengurangi potensi pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang semakin melebar, di mana segelintir orang yang berkuasa mendapatkan keuntungan besar sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Hermawan et al. (2024) menekankan bahwa korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur menyebabkan penurunan produktivitas, memperburuk kualitas barang dan layanan, serta memprlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Penurunan kualitas infrastruktur ini, disebabkan oleh penyalahgunaan dana publik, menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa investasi yang semestinya mengarah pada pembangunan infrastruktur yang memadai seringkali terganggu oleh praktik korupsi yang mengalihkan sebagian besar dana untuk kepentingan pribadi. Hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi, dengan masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Danardono (2024) juga menyoroti bahwa korupsi yang melibatkan proyek-proyek besar mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang optimal dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya dua fenomena ini, baik perputaran uang judi online yang semakin marak maupun korupsi megatransaksional dalam sektor publik, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kedua faktor tersebut terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, dengan fokus pada inflasi, deflasi, perputaran uang judi online, dan korupsi. Analisis ini akan menggali bagaimana kebijakan moneter Indonesia dapat merespon dinamika ekonomi ini untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

**Rumusan Masalah:**

* Apa pengaruh inflasi dan deflasi terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir?
* Bagaimana perputaran uang judi online memengaruhi kebijakan moneter dan ekonomi secara keseluruhan?
* Apa dampak dari kasus korupsi terhadap perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan perputaran dana yang besar dan hilangnya pendapatan negara?

### ****Tinjauan Pustaka****

#### **Inflasi dan Deflasi**

Inflasi dan deflasi adalah dua fenomena utama yang memengaruhi perekonomian makro. **Inflasi** terjadi ketika **permintaan agregat** (total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian) melebihi **penawaran agregat** (total pasokan barang dan jasa), yang menyebabkan harga barang dan jasa naik. Sebaliknya, **deflasi** terjadi ketika **penawaran agregat** melebihi **permintaan agregat,** menyebabkan harga barang dan jasa turun. Kedua fenomena ini, meskipun berlawanan, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan bank sentral.

Menurut teori **Permintaan dan Penawaran Agregat**, inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk **kenaikan biaya produksi, perubahan dalam kebijakan moneter,** dan **kenaikan permintaan konsumsi** yang melebihi kapasitas produksi negara. Sebaliknya, deflasi lebih sering dipicu oleh **penurunan permintaan,** seperti yang terjadi selama krisis ekonomi atau resesi. Dalam kondisi deflasi, konsumen cenderung menunda pembelian mereka, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi karena menurunnya konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2025, Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,48% pada bulan Februari, yang dipengaruhi oleh **normalisasi harga pangan** dan kebijakan **diskon listrik** yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan mendukung daya beli masyarakat. Namun, deflasi yang terjadi pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara **penawaran dan permintaan** dalam perekonomian. Di sisi lain, tingkat inflasi yang tercatat pada angka 1,60% mencerminkan **upaya pengendalian harga yang efektif** melalui kebijakan **moneter** dan **fiskal** yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Namun, meskipun inflasi terkendali, fluktuasi harga pangan dan energi tetap menjadi tantangan bagi daya beli masyarakat, terutama bagi **keluarga berpendapatan rendah** (Laras et al., 2024).

Faktor eksternal seperti kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi kedua fenomena ini. **Kebijakan fiskal** yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi dapat memperburuk inflasi jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Demikian pula**, kebijakan moneter** yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti **penyesuaian suku bunga** atau **pengaturan jumlah uang beredar,** dapat mengontrol inflasi, tetapi jika tidak tepat, dapat menambah ketidakpastian ekonomi.

#### **Judi Online dan Dampaknya**

Sektor judi online telah menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Pada 2025, diperkirakan sektor ini akan mengalami lonjakan perputaran uang yang besar, mencapai Rp 1.200 triliun. Salah satu dampak dari fenomena ini adalah aliran uang yang besar tersebut sering kali tidak tercatat dalam sistem ekonomi formal, sehingga menyulitkan pengawasan dan mengganggu kestabilan sektor keuangan negara. Uang yang berputar dalam sektor ini cenderung tidak memberikan kontribusi pada produktivitas ekonomi karena lebih banyak digunakan untuk taruhan daripada untuk konsumsi yang produktif atau investasi yang menguntungkan.

Selain itu, judi online sering kali terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), dan bahkan proliferasi senjata. Uang yang dipertaruhkan sering kali digunakan untuk mencuci dana melalui berbagai platform, yang menambah ketidakpastian dalam stabilitas sistem keuangan. **Nayottama (2024)** menemukan bahwa sektor judi online dapat memperburuk **ketimpangan sosial** di Indonesia, dengan banyak individu yang terjerat utang besar dan mengalami kesulitan keuangan akibat kecanduan berjudi. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memperburuk **kesenjangan pendapatan** dan merusak kesejahteraan sosial (Nayottama, 2024).

Sebagai tambahan, promosi judi online yang agresif di media sosial dan aplikasi daring dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama **generasi muda** yang lebih terpapar pada teknologi digital. **Laras et al. (2024)** menunjukkan bahwa promosi yang masif dapat meningkatkan jumlah pemain judi, yang pada gilirannya meningkatkan **kerugian ekonomi** dan **kerusakan psikologis** bagi individu yang terlibat.

#### **Korupsi dan Ekonomi**

Korupsi telah lama menjadi masalah besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Korupsi sering kali mengarah pada ketidakstabilan ekonomi, karena pendanaan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor sosial lainnya, justru disalahgunakan oleh individu yang berkuasa. Dalam konteks Teori Ekonomi Politik, korupsi menciptakan ketimpangan yang semakin besar antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem hukum, yang memperburuk stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Danardono, 2024).

Contoh konkret dari dampak korupsi adalah kasus **Pertamina,** yang merugikan negara sebesar **Rp 968,5 triliun.** Kasus ini menggambarkan betapa buruknya dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, karena kerugian tersebut mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan pendidikan. **Hermawan et al. (2024)** menambahkan bahwa korupsi di sektor-sektor kunci, seperti infrastruktur, menghambat investasi asing dan domestik, serta produktivitas di berbagai sektor.

Korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial karena seringkali dana yang disalahgunakan berasal dari pajak rakyat, yang seharusnya digunakan untuk membiayai program-program yang menguntungkan masyarakat luas. Sebagai contoh, korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur mengurangi kualitas pembangunan, yang pada akhirnya memperburuk akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Hermawan et al., 2024)

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber statistik resmi, laporan tahunan, dan data keuangan Indonesia.

### ****Analisis dan Pembahasan****

#### **Inflasi dan Deflasi**

Pada tahun 2025, **inflasi Indonesia** tercatat relatif rendah, yaitu 1,60%, sementara deflasi tercatat sebesar 0,48% pada bulan Februari. Angka inflasi yang rendah ini menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjaga **stabilitas harga** barang dan jasa. Kebijakan seperti **diskon listrik** dan pengaturan harga pangan berkontribusi dalam mengurangi tekanan inflasi yang sering kali dipicu oleh kenaikan harga energi dan kebutuhan dasar lainnya. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan **daya beli masyarakat** yang masih bisa dipertahankan, meskipun adanya peningkatan biaya hidup akibat ketegangan global dan fluktuasi harga bahan pokok.

Namun, **deflasi** yang terjadi pada awal 2025 menandakan adanya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Deflasi, yang disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan pada gilirannya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Nayottama (2024) mengungkapkan bahwa deflasi sering kali terjadi ketika konsumsi rumah tangga menurun, yang mengindikasikan adanya penurunan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, atau karena konsumsi yang terhambat oleh faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan kebijakan moneter yang ketat.

Pada saat yang sama, Bank Indonesia harus tetap waspada terhadap dampak jangka panjang dari deflasi. Deflasi yang tidak terkendali bisa mengarah pada penurunan investasi karena perusahaan menunda pengeluaran mereka dengan harapan harga barang akan lebih murah di masa depan. Hal ini dapat memperburuk kondisi pasar tenaga kerja dan memperburuk prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. **Hermawan et al. (2024)** mencatat bahwa deflasi yang berlarut-larut dapat menyebabkan penurunan dalam **produktivitas** dan menambah kesulitan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan beradaptasi dengan fluktuasi harga.

#### **Perputaran Uang Judi Online**

Pada tahun 2025, sektor judi online diperkirakan akan menghasilkan perputaran uang yang sangat besar, mencapai Rp 1.200 triliun. Angka yang fantastis ini menunjukkan besarnya aliran uang yang tidak tercatat dalam sistem ekonomi formal. Fenomena ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, terutama dalam meningkatkan ketidakstabilan sistem keuangan Indonesia. Uang yang beredar dalam judi online tidak menghasilkan nilai tambah yang produktif, melainkan mengarah pada pengeluaran yang tidak menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial atau pendapatan nasional.

Fenomena ini juga berhubungan erat dengan masalah pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT), yang menciptakan ketidakpastian dalam pengawasan dan keamanan finansial Indonesia. Laras et al. (2024) menyatakan bahwa judi online sering kali digunakan sebagai saluran untuk pencucian uang, di mana transaksi besar yang terlibat tidak dapat dilacak dengan mudah, memengaruhi integritas sistem perbankan dan sistem finansial yang lebih luas.

Lebih dari itu, fenomena judi online juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut Nayottama (2024), kecanduan judi online menempatkan individu dalam situasi kesulitan finansial, karena banyak pemain yang kehilangan uang yang mereka pertaruhkan tanpa mendapatkan hasil yang produktif. Ketimpangan ini juga menyebabkan kesenjangan sosial, di mana sebagian besar pemain yang terlibat dalam judi online adalah individu dengan pendapatan rendah yang lebih mudah terjerat dalam utang, sementara yang lainnya memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi mereka.

**Kasus Korupsi**

Korupsi dalam proyek-proyek besar, terutama di sektor infrastruktur, telah lama menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kasus Pertamina, yang merugikan negara sebesar Rp 968,5 triliun. Korupsi semacam ini mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sektor sosial lainnya, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan negara dan kualitas pelayanan publik. Hermawan et al. (2024) mengungkapkan bahwa korupsi tidak hanya mengarah pada pemborosan dana tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial di mana proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terhambat atau gagal karena aliran dana yang salah kelola.

Korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah disalahgunakan oleh segelintir orang yang berkuasa. Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperburuk akses masyarakat terhadap layanan dasar yang sangat diperlukan. Dalam konteks Teori Ekonomi Politik, korupsi menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, memperburuk efisiensi pasar, dan menurunkan kualitas barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat (Danardono, 2024).

Solusi untuk mengatasi dampak korupsi mencakup penerapan penegakan hukum yang lebih ketat, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam pengawasan proyek-proyek besar guna memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

### ****Kesimpulan dan Rekomendasi****

#### **Kesimpulan**

Dinamika ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi negara. **Inflasi** dan **deflasi,** sebagai dua fenomena utama dalam perekonomian makro, memiliki peran yang krusial dalam menciptakan ketidakstabilan atau kestabilan harga barang dan jasa. **Inflasi**, meskipun terkendali pada angka 1,60%, tetap memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa harga barang dan kebutuhan pokok tidak melonjak terlalu tajam, terutama di tengah ketidakpastian global dan harga pangan yang fluktuatif. Sebaliknya, **deflasi** yang terjadi pada awal tahun, dengan angka 0,48% pada bulan Februari 2025, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga permintaan agregat, khususnya dalam sektor konsumsi rumah tangga, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Nayottama, 2024).

Selain itu, fenomena perputaran uang judi online, yang diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun pada tahun 2025, menjadi salah satu penyumbang ketidakstabilan ekonomi yang cukup besar. Aliran uang yang tidak tercatat dalam sistem ekonomi formal ini dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan negara, karena sering kali terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya. Judi online tidak hanya memberikan dampak negatif pada perekonomian, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, mengurangi kualitas hidup banyak orang, dan meningkatkan angka kecanduan yang berhubungan dengan kesehatan mental (Laras et al., 2024).

Tak kalah pentingnya, korupsi dalam sektor publik, yang telah merugikan negara sebesar Rp 968,5 triliun melalui kasus Pertamina, menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hermawan et al. (2024) mengungkapkan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan ini, dengan segelintir individu yang berkuasa mengalihkan dana publik untuk keuntungan pribadi, sementara masyarakat luas menderita akibat pelayanan yang buruk dan pengurangan anggaran untuk sektor-sektor penting.

Secara keseluruhan, meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, keberadaan judi online yang masif dan praktik korupsi yang merajalela tetap menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor eksternal dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang.

#### **Rekomendasi:**

1. **Kebijakan Moneter yang Lebih Hati-hati**

Pemerintah perlu merancang kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan fleksibel, dengan mempertimbangkan dampak deflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi. Selain itu, potensi inflasi yang dapat meningkat secara tiba-tiba akibat kenaikan harga energi dan biaya produksi harus diawasi secara lebih ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian domestik. Bank Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali tanpa menurunkan daya beli masyarakat.

1. **Penegakan Hukum yang Lebih Ketat terhadap Judi Online dan Korupsi:**

Penegakan hukum terhadap judi online dan korupsi harus diperketat. Untuk judi online, diperlukan kerjasama lintas sektor, baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta sektor swasta, untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal dan menghentikan promosi judi online melalui media sosial. Sedangkan untuk korupsi, perlu ada peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, terutama di sektor infrastruktur yang sering menjadi sasaran korupsi. Upaya rehabilitasi mental bagi individu yang terjerat dalam judi online juga perlu diperkenalkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Bakhtiar & Adilah, 2024).

1. **Pengawasan terhadap Aliran Dana Ilegal dan Peningkatan Transparansi:**

Pengawasan terhadap aliran dana ilegal harus diperketat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk melacak transaksi yang mencurigakan, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam menanggulangi pencucian uang yang melibatkan judi online. Peningkatan transparansi di sektor publik melalui platform e-government dapat memastikan bahwa setiap aliran dana negara tercatat dengan jelas, mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

1. **Peningkatan Peran Sektor Swasta:**

Sektor swasta perlu didorong untuk berperan lebih aktif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan stabil yang dapat dilakukan dengan mendorong investasi produktif dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti teknologi hijau, infrastruktur digital, dan energi terbarukan. Selain itu, sektor swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih inklusif, dan membantu memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. untuk menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan stabil, dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas dalam penanggulangan korupsi, perputaran uang ilegal, dan penurunan ketimpangan sosial, serta penguatan peran sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

### ****Referensi****

**Bakhtiar, S. H.**, & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 1016-1026.

**Danardono, D.** (2024). Dampak Negatif Tindak Pidana Korupsi dalam Terwujudnya Stabilitas Nasional. Maleo Law Journal, 8(1), 50-59.

**Hermawan, D.**, Fatullah, A. P., Cayadi, A., & Hidayat, A. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang. Innovative Journal of Social Science Research, 4(1), 4259-4271.

**Laras, A.**, Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J., & Dinda, F. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 320-331.

**Mauro, P.** (1998). Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.

**Nayottama, N. Z.** (2024). Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa. Moderasi Journal of Social Science, 5(2), 158-169.